

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam upaya menyajikan suatu penulisan yang jelas dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu diberikan batasan maupun ketegasan terhadap setiap yang tercakup dalam penulisan skripsi ini dalam bentuk kerangka berpikir melalui teori-teori terkait dan konsep-konsep kunci, dengan demikian diharapkan dapat terhindar dari kesalahpengertian.

1. Teori Tingkat Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Definisi teori pengangguran ini merupakan permasalahan makroekonomi terbesar disuatu negara maupun daerah. Yang mempengaruhi manusia secara langsung dan paling berat, kehilangan suatu pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau seang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dalam sensus penduduk dimana seseorang tidak bekerja dalam waktu kurang dari dua hari dalam selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan, maka seseorang tersebut tergolong menganggur atau pengangguran.

Pengertian pengangguran banyak dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Nanga (2005) pengangguran adalah dimana seseorang yang sudah dikategorikan angkatan kerja atau usia kerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Menurut Sukirno dalam jurnal Muslim (2014) pengangguran adalah dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dan seseorang yang tidak aktif dalam mencari pekerjaan tidak termasuk sebagai penganggur. Adapun faktor yang dapat menimbulkan pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa untuk mencari keuntungan yang hanya diperoleh apabila pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan suatu produksi dalam perusahaan yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak jumlah tenaga kerja dalam perekonomian.

Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara digunakan dalam bentuk yang dinamakan tingkat pengangguran yaitu dari jumlah penganggur yang dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Menurut Sumarsono (2009) menjelaskan bahwa yang termasuk pengangguran terbuka adalah semua angkatan kerja yang tidak bekerja, maupun

sedang mencari kerja baik sedang mencari kerja yang secara sukarela maupun karena terpaksa, baik itu baru pertama kali ataupun mencari kerja setelah Putus Hubungan Kerja (PHK), yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka lebih baik dalam menjelaskan besaran jumlah pengangguran yang terjadi.

b. Jenis-Jenis Pengangguran

Salah satu timbulnya permasalahan pengangguran dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

(1) Pengangguran Friksional

Merupakan pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan karena seseorang dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Terdapat tiga alasan yang bisa diklasifikasikan sebagai pengangguran friksional (Mankiw, 2003) yaitu

- (a) Tenaga kerja yang baru pertama kali terjun mencari pekerjaan. Sebagai angkatan kerja terdapat golongan penduduk usia untuk syarat suatu pekerjaan. Misalnya pelajar SMA/SMK sederajat, Sarjana yang baru saja menyelesaikan pelajarannya dan juga sedang aktif mencari lowongan pekerjaan.
- (b) Pekerja yang meninggalkan pekerjaan dan mencari pekerjaan baru, karena merasa tidak nyaman atau terjadinya krisis perekonomian yang tidak seperti biasanya dan mencari pekerjaan baru untuk memperoleh upah yang tinggi dari sebelumnya.

(c) Pekerja yang memasuki pasaran buruh, para pekerja meninggalkan pekerjaan lama nya karena suatu hal, namun memutuskan untuk bekerja lagi diperusahaan tersebut.

(2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran Siklikal merupakan pengangguran yang timbul sebagai akibat menurunnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat didalam perekonomian dibandingkan penawaran agregat.

(3) Pengangguran Struktural

Jenis pengangguran ini terjadi akibat perubahan yang didalam struktur pasar terjadi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan dan mengakibatkan beberapa industri dan perusahaan akan berkembang cepat ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang mendominasi peranan ekonomi dalam kegiatan produksi maupun dalam kesempatan kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran struktural sebagai berikut:

(a) Teknologi yang semakin tahun ketahun yang telah mengalami perkembangan. Sebelum adanya industri komputer pada jaman yang berkembang ini, terdapat pula industri mesin ketik yang sebelumnya telah mengembangkan sektor industri tekonologi. Hal ini semakin meluasnya pengguna komputer yang menyebabkan permintaan mesin ketik berkurang dan industri mengalami kemunduran. Sehingga para

pekerja menjadi menganggur. Pengangguran ini disebut juga pengangguran teknologi.

- (b) Adanya persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah yang menyebabkan kemunduran. Banyaknya persaingan dari luar negeri di negara-negara maju mengakibatkan mereka untuk membatasi impor barang-barang seperti barang konsumen, ekspor pakaian dan sepatu yang murah. Sehingga akan menyebabkan pengangguran struktural.
- (c) Akibat adanya pertumbuhan yang pesat maka perkembangan ekonomi akan mengalami kemunduran.

Menurut Sukirno, pengangguran di negara-negara sedang berkembang terbagi menjadi :

- (a) Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
- (b) Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja. Di banyak negara berkembang seringkali didapati banyak faktor, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah besar kecilnya suatu pekerjaan, jenis perusahaan, jenis perusahaan dan

jumlah pekerja yang digunakan lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

- (c) Pengangguran musiman terdapat di sektor pertanian dan perikanan, yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Selama masa menunggu, mereka tergolong sebagai pengangguran musiman. Ada musim giat dalam bekerja dan ada masa mengendur yang terjadi secara otomatis bisa tiba masa giat kembali
- (d) Setengah menganggur (*underemployed*) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum. Misalkan dalam pekerjaan part time dalam sehari bekerja dalam waktu hitungan jam atau setengah hari contohnya guru disekolah, ojek online atau menjadi pelayan di cafe.

2. Kependudukan

a. Pengertian Kependudukan

Secara umum penduduk dan warga negara adalah sekelompok atau sejumlah orang yang menetap di suatu negara yang saling berinteraksi dan saling terikat pada aturat-aturan yang berlaku disetiap daerah atau negara dengan syarat harus memiliki surat resmi untuk tinggal diwilayah tersebut. penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas dari warga negara atau pun bukan (Wirosuhardjo, 1986).

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang adanya sangkutpaut dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan hidup dengan upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi (Syam & Wahab, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan dan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain mendefinisikan penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang tinggal disuatu wilayah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan oleh hukum atau undang-undang berlaku.

b. Teori-Teori Kependudukan

Dalam teori kependudukan terdapat para ahli yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertama, kelompok penganut Malthusian. Aliran Malthusian ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua adalah kelompok aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kelompok ketiga merupakan pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformasi teori-teori kependudukan yang ada.

(1) Teori Malthus (Thomas Robert Malthus)

Orang yang pertama yang mengemukakan teori mengenai penduduk ialah Thomas Robert Malthus yang merupakan seorang pendeta di Inggris yang hidup pada tahun 1776 hingga wafat tahun 1824. Pada bukunya ia mengemukakan bahwa hubungan kelamin yang terjadi antara seseorang laki-laki dan perempuan yang secara terus menerus dengan rasa nafsu yang tidak bisa dihentikan yang dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesat. Malthus juga berpendapat bahwa manusia hidup memerlukan bahan makanan dan minuman, namun laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan laju pertumbuhan makanan yang lambat. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan pertumbuhan penduduk untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan makanan.

(2) Teori Neo-Malthusian

Teori Neo-Malthusian Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok Neo-Malthusian adalah kelompok yang mendukung aliran Malthusian tetapi bersifat lebih radikal. Kelompok ini menganjurkan agar dapat keluar dari perangkap Malthus, pengurangan penduduk dilakukan dengan cara preventive check yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk dapat mengurangi jumlah kelahiran. Aliran ini berusaha menyadarkan manusia dengan fakta-fakta yang ada bahwa jumlah penduduk dunia terus menerus bertambah sedangkan bahan makanan mengalami kelangkaan, wilayah dunia semakin sempit karena kepadatan 26 manusia sehingga tempat tinggal manusia

menjadi rusak dan tercemar. Dalam buku yang berjudul “The Limits to Growth”, Meadows menjelaskan antara hubungan pertumbuhan penduduk dengan beberapa variabel lain seperti produksi pertanian, penggunaan sumber daya alam, produksi industri serta polusi. Kelima variabel tersebut digambarkan dalam tiga tahapan yaitu kenaikan, stabil, dan penurunan, dan pada setiap variabel tidak terjadi bersamaan di setiap tahapan. Pada saat jumlah penduduk mengalami kenaikan maka sumber daya alam telah mengalami penurunan, produksi pertanian dan industri mengalami kenaikan. Akan tetapi jumlahnya tidak dapat mengimbangi kenaikan jumlah penduduk, sementara itu secara konsisten tingkat polusi terus meningkat akibat dari naiknya jumlah penduduk dan industri.

(3) Teori Marxist

Teori ini adalah teori yang tidak sependapatan dengan teori Malthus. yang merupakan teori generasi sesudah Malthus. Teori Marxist dikemukakan oleh Karl Marx dan Fried Engels. paham Marxist pada umumnya tidak sependapatn dengan Malthus yang bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan karena menurut Karl Marx dan Fried Engels bertentangan dengan nurani manusia menurut mereka pertambahan penduduk yang cepat tidak berakibat kepada tekanan bahan pangan yang mengakibatkan kelaparan namun, tekanan penduduk akan mengakibatkan tekanan terhadap kesempatan kerja. Kemiskinan yang dialami penduduk disebabkan oleh kesalahan struktur pada masyarakat, dimana kaum kapitalis (pemilik modal) mengambil sebagian pendapatan para buruh dengan cara

membayar buruh dengan upah yang murah. Oleh karena itu menurut Karl Marx dan Fredrich Engel yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan atau kemelaratan bukanlah mengurangi jumlah penduduk, akan tetapi melakukan perubahan sosial.

(4) Teori John Stuart Mill

John Stuart Mill, merupakan seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tingkat kelahiran manusia dapat ditentukan oleh manusia itu sendiri, oleh karena itu Mill menyarankan untuk meningkatkan pendidikan penduduk sehingga secara rasional mereka akan dapat mempertimbangkan apakah perlu menambah jumlah anak atau tidak dan menyesuaikan dengan karir dan pekerjaan mereka. Mill berpendapat bahawa perempuan pada umumnya tidak menginginkan anak yang banyak, sehingga hal tersebut tentu akan membuat tingkat kelahiran menjadi rendah.

c. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pengangguran Terbuka

Kenaikan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut,

tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada berbagai macam masalah ekonomi seperti meningkatnya pengangguran yang terus bertambah. Tingginya angka kemiskinan dan berbagai macam masalah ekonomi lainnya di setiap wilayah atau negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, serta upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang merupakan bagian dari penduduk suatu negara, yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan karena banyaknya angkatan kerja dan pengangguran adalah bagian dari penduduk yang dapat menggerakkan proses ekonomi.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu setiap daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan nasional.

Berbagai teori menjelaskan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah sendiri, yang berdasarkan dari peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut ini pengertian PAD yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Halim (2004) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari suatu daerah dari sumber yang ada didalam daerah itu sendiri yang dijelaskan pada peraturan perundangan yang berlaku didalam daerah atau wilayah tersebut. Disektor pendapatandaerah memegang peranan yang sangat penting, karena disektor ini dapat dliha sejauh mana suatu daerah atau wilayah dapat membiayaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Kemudian menurut Suganda (2019) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah yang diperoleh dan digali dari hasil yang dikelola sendiri guna memperkecil ketergantungan.

Dan menurut Mamesah (1995) menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain snesuai ketentuan/peraturan.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yangbersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan aslidaerah yang sah.

b. Faktor Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Sebagai alat pengukur, penakar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerah lah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Yuwono, 2005).

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang digali oleh pemerintah daerah melalui usaha-usaha yang dilakukan. Kelompok

pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan (Halim, 2002), yaitu:

- 1) Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hasil pajak daerah diambil dari sejumlah uang yang dipungut oleh pemerintah daerah yang ditetapkan untuk pembiayaan rumah tangganya dalam badan hukum politik yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum dan jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- 2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Hasil retribusi daerah diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas bayaran yang diberikan masyarakat dalam memakai jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang bersangkutan. Sifat dari retribusi daerah yaitu ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan yang formal dan materi. Adapun alternatif untuk tidak membayar yang merupakan pungutan bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal ini tentu menjadi pengembalian daerah untuk memenuhi permintaan seluruh masyarakat.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana dari pembangunan daerah baik perusahaan yang hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dengan motif pendirian dan pengelolaan yang sifat dari

perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang dapat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mempertimbangkan perekonomian daerah. Jenis pendapatan daerah meliputi objek pendapatan berikut:

- (a) Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - (b) Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - (c) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - (d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
- 4) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Dari yang didapat usaha daerah yang sah yaitu untuk pembuka bagi pemerintah daerah guna melakukan kegiatan yang menghasilkan baik itu materi dengan tujuan menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

d. Hubungan antara PAD dengan Pengangguran Terbuka

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya karena pendapatan asli daerah mengalami proses kenaikan. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait

dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Untuk itu PAD mengoptimalkan dan mengelola alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ ketimpangan regional.

Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri dan akan berpengaruh juga terhadap penurunan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

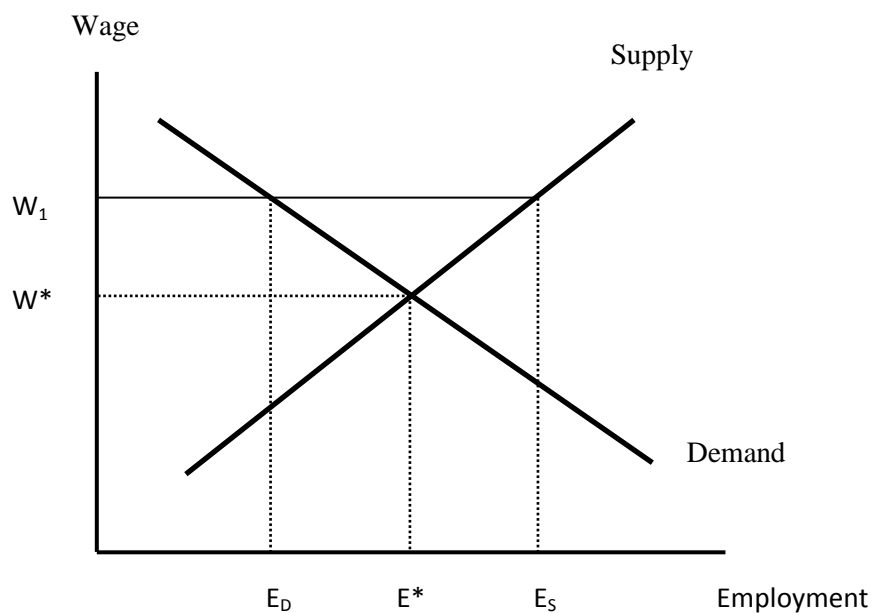
4. Upah

a. Definisi Upah

Menurut Indriyono & Basri (1995) Definisi atau pengertian gaji pokok/upah adalah sesuatu yang diterima berupa uang ataupun barang sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah ialah suatu penerimaan atau imbalan dari pemberi kerja untuk suatu yang pekerjaan yang telah dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi masyarakat yang dinilai dalam bentuk uang dan mendapat persetujuan Undang-Undang dan Peraturan atas dasar perjanjian perusahaan dengan pekerja.

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.



Sumber: Brown, Gilroy, & Kohen, 1982

Gambar 2.1
Upah Terhadap Tenaga Kerja

Adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, hal ini berarti jumlah tenaga kerja yang diminta akan berkurang dan begitu pula sebaliknya jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja

yang ditawarkan akan menjadi lebih sedikit. Kurva penawaran tenaga kerja memiliki lereng yang positif. Permintaan dan penawaran tenaga kerja terjadi di pasar tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penerimaan imbalan dari perusahaan kepada pekerja dalam pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk yang telah ditetapkan perundang-undang atas dasar suatu perjanjian antar pekerja dengan perusahaan yang termasuk dalam tunjangan baik itu untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.

Menurut Undang-Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000 upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." (Bab I, pasal 1, Ayat 30).

G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi:

- 1) Upah nominal Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan sesuai dengan ketentuan ketetapan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri, perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

- 2) Upah nyata (*real wages*) Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan..
- 3) Upah hidup adalah upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.
- 4) Upah minimum Pendapatan yang dihasilkan para buruh yang layak dan cukup sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yang berperan dalam hubungan ketenagakerjaan.
- 5) Upah wajar Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Menurut Moekijat (1992) didalam bukunya administrasi Gaji dan Upah menyimpulkan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan Gaji dan Upah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Gaji dan Upah yang diberikan oleh pihak swasta

Apabila gaji dan upah yang diberikan pihak swasta naik, maka gaji pegawai negeri cenderung dinaikan juga.

- 2) Kondisi keuangan negara

Apabila keuangan negara belum memadai, maka kenaikan gaji pegawai negeri akan sulit dilakukan.

3) Biaya hidup

Biaya hidup yang meningkat akan mempengaruhi tinggi rendahnya gaji dan upah dan akan mengakibatkan perlunya gaji dan upah dinaikan.

4) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah dapat membatasi besarnya gaji dan upah, misalnya memuat ketentuan gaji atau upah minimum.

5) Kekayaan Negara

Kekayaan negara mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah. Negara yang kaya dapat memberi gaji yang tinggi kepada pegawai-pegawainya.

6) Produktivitas pegawai

Pegawai yang produktivitasnya tinggi, perlu diberi gaji atau upah yang tinggi.

7) Persediaan tenaga kerja

Apabila persediaan tenaga kerja dalam masyarakat sangat kurang, maka ada kecenderungan gaji dan upah dinaikan.

8) Kondisi kerja

Orang yang bekerja dalam kondisi kerja yang resikonya besar, mendapat gaji atau upah yang lebih banyak daripada orang lain yang bekerja dalam kondisi kerja yang resikonya kecil.

9) Jam kerja

Jumlah jam kerja mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah yang diberikan. Orang yang bekerja 10 jam akan menerima gaji atau upah yang lebih banyak daripada orang lain yang bekerja selama 6 jam untuk pekerjaan yang sama.

10) Perbedaan geografis

Perbedaan geografis menyebabkan perbedaan dalam kondisi hidup. Kondisi hidup yang berubah mengakibatkan perbedaan dalam besarnya gaji dan upah .

11) Inflasi

Apabila ada inflasi, maka gaji dan upah riil pegawai turun. Dalam keadaan yang demikian gaji dan upah perlu dinaikan.

12) Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional mempengaruhi besarnya gaji dan upah. Apabila pendapatan nasional meningkat, maka gaji dan upah pegawai dapat dinaikan.

13) Harga pasar

Harga pasar mempengaruhi besar kecilnya gaji dan upah pegawai. Apabila ik tetap gaji dan upah pegawai tetap, maka hal ini berarti bahwa gaji riil pegawai turun dan perlu dinaikan.

14) Nilai sosial dan etika

Dari segi sosial dan etika, pemerintah kurang bebas dalam menentukan kebijakan mengenai gaji para pegawainya. Negara

dibebani kewajiban untuk memberikan kesejahteraan umum dan memelihara kondisi masyarakat yang diinginkan.

Upah minimum sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan wilayah yaitu Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dalam setiap daerah provinsi maupun kabupaten upah yang diberikan dari perusahaan berbeda-beda tergantung dari masing-masing daerah tersebut. Besaran UMP ditentukan oleh gubernur masing-masing provinsi, karena kebutuhan hidup setiap provinsi berbeda-beda.

Menurut pasal 1 angka 2 keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1. Pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di provinsi, Besarnya upah minimum di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak sama karena tergantung dari apa yang dilihat dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) di setiap wilayah yang bersangkutan. Ketentuan dalam menentukan UMK harus lebih besar dari UMP. Peraturan ini dibuat agar Perusahaan dalam menetapkan Upah Minimum tidak membayar upah lebih rendah dari UMK. Hal ini pemerintah ingin mensejahterakan para pekerja dengan memberlakukan ketentuan UMK bagi Kabupaten/Kota yang telah mempunyai ketentuan UMK tersebut.

b. Komponen Upah Minimum

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah yang terdapat komponen yang tergolong dalam kategori upah atau upah minimum diantaranya sebagai berikut:

1) Gaji Pokok

Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

2) Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan (pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu.

3) Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

c. Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan suatu standar minimum yang akan digunakan oleh para pengusaha atau pelaku

industri dalam memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sedangkan upah minimum itu sendiri didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dalam menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah Minimum dapat diterapkan berdasarkan wilayah dan provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. pelaksanaan penangguhan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Penetapan upah minimum pada suatu Provinsi dan

Kabupaten/Kota di dalam Provinsi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur Provinsi tersebut.

d. Hubungan upah minimum kabupaten/kota dengan pengangguran terbuka

Upah merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh pekerja disebuah perusahaan. Setiap daerah masing-masing upah minimum yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan berbeda-beda tergantung tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Upah minimum berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, setiap kabupaten Upah Minimum akan ditentukan oleh Gubernur pada daerah masing-masing.

Menurut Samuelson (1997) mengemukakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan keluarga dan lebih banyak barang yang dibeli pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berbelok kebelakang.

Menurut Sukirno (2013) mengemukakan bahwa dalam kurva philips ada hubungan negatif antara kenaikan upah dengan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi maka tingkat upah rendah dan sebaliknya jika pengangguran rendah maka tingkat upah tinggi.

Menurut Sumarsono (2009) adanya hubungan positif antara upah minimum dengan tingkat pengangguran. Dimana ketika upah minimum itu naik maka input yang diterima pada tenaga kerja akan dikurangi yang menyebabkan pengangguran mengalami kenaikan. Dan ini berlaku pada usaha yang bersifat formal.

5. Indek Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut UNDP indek pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia diantaranya: panjang umur dan menjalani hidup sehat, terdidik, (yang diukur dengan melihat kemampuan baca tulis pada tingkat sekolah dasar-tingkat akhir atau orang dewasa) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari penghasilan, dan paritas daya beli/ PPP (UNDP,2004). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dan dimensi terakhir yaitu standar hidup yang layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB digunakan untuk kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (Indek Pembangunan Manusia, BPS,2007)

Paradigma pembangunan Manusia Terdiri dari 4 komponen utama (UNDP,1995) yaitu:

1) Produktivitas

Dalam buku Mankiw (2006) menjelaskan bahwa standar seseorang yang hidup di berbagai negara dikaitkan dengan produktifitas, dimana produktivitas yang tinggi dari suatu dapat membuat masyarakat menikmati standar hidup yang tinggi pula, karena tingkat produktivitas yang menentukan tingkat pertumbuhan rata-rata masyarakat.

2) Ekuitas

Dalam memperoleh masyarakat yang adil, semua hambatan yang terjadi dalam ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat ikut serta untuk mendapatkan manfaat dari kesempatan ini.

3) Kestinambungan

Kesempatan yang menjadi generasi masa mendatang yang dapat memperoleh akses kesempatan yang sama sehingga sumberdaya fisik dan lingkungan harus diperbaharui.

4) Pemberdayaan

Dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat harus ikut serta secara penuh untuk menentukan suatu langkah kehidupan yang mereka lakukan. Keberhasilan suatu negara atau wilayah diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah diperkenalkan oleh UNDP pertama kali pada tahun 1990 yang telah dipublikasikan dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Terdapat tiga dimensi dasar

yang membentuk IPM yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan serta standar hidup layak. BPS mendefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seorang sejak lahir.

b. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Rumus untuk menghitung indeks pembangunan manusia yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{X (1)} + \text{X (2)} + \text{X (3)})$$

Dimana:

X (1): Indeks harapan hidup.

X (2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata).

X (3): Indeks standar hidup layak.

Terdapat tiga indeks yang menjadi komponen perhitungan

1) Dimensi Kesehatan

Dimensi Kesehatan dihitung dengan melihat angka harapan hidup saat lahir dalam satuan dengan rumus

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks

AHH = Angka Harapan Hidup

2) Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dihitung dengan memasukan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan rumus

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Keterangan

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rala-Rata Lama Sekolah

3) Dimensi Pengeluaran

Dimansi Pengeluaran dihitung denga menggunakan pengeluaran perkapita disesuaikan.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

4) Indeks Pembangunan Manusia

Dihitung sebagai rata-rata geometric dari ketiga indeks komponennya dan dinyatakan dalam bentuk poin.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

c. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Kedudukan dan Peran Indeks Pembangunan Manusia

Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data yang lengkap. Sistem data yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji berbagai kendala dan implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai tolok ukur pembangunan yang dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian prestasi IPM adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut dan di pihak lain kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya prestasi kita dikancah internasional dan hal ini masih banyak indikator-indikator IPM yang belum terpenuhi.

e. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan itu sendiri. Pembangunan

manusia yang baik akan mendorong adanya penggunaan teknologi modern yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas output yang nantinya akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan terciptanya kesempatan kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada, saat tenaga kerja telah terserap maka pendapatan masyarakat akan tinggi sehingga pengeluaran rumah tangga atas konsumsi makanan beserta pendidikan akan meningkat pula. Dengan begitu pengurangan pengangguran akan tercapai ketika indeks pembangunan manusianya tinggi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Zulaili (2017) dalam penelitian ini yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, peneliti ini menggunakan variabel Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, dan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengetahui tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Dari hasil regresi data panel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Nurcholis (2014) dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, Upah Minimum menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dan Indek Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Adriani dan Yasa (2015) dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka Pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Suwandika dan Yasa (2015) dalam penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran, peneliti ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, investasi untuk mengetahui Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali, Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Muminin dan Hidayat (2017) dalam penelitian ini berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka,

peneliti ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah penduduk untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil regresi data panel disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Adriansyah (2018) dalam jurnal nya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran, peneliti ini menggunakan variabel Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Indeks Pembangunan Manusia untuk mengetahui Pengangguran di Kota Medan. Dimana pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Kota Medan, variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Medan, variabel Tingkat Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Medan, dan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Medan.

Khairunisa (2017) dalam jurnal nya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah, peneliti ini menggunakan variabel Inflasi, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kota (UMK) untuk mengetahui pengangguran di kota-kota Jawa Tengah. Dimana pada penelitian ini menggunakan Metode Data Panel dan hasil penelitian

menunjukkan pengaruh variabel inflasi tidak berpengaruh karena memiliki koefisien lebih besar dari 0.05, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka dikota-kota Jawa Tengah, dan variabel Upah Minimum Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka dikota-kota Jawa Tengah.

Sisnita (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung, peneliti ini menggunakan variabel Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung. Dimana dalam penelitian ini menggunakan Model Data Panel dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung, variabel Upah Minimum tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung, variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung.

Kuntiarti (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Peneliti ini menggunakan variabel Inflasi, Jumlah Penduduk, Kenaikan Upah Minimum. Dimana dalam penelitian ini menggunakan Model Data Panel dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2010 -2015, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten, dan variabel kenaikan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Firdhania dan Muslihatiningsih (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember. Peneliti ini menggunakan variabel Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum. Dimana dalam penelitian ini menggunakan Model Analisis Deskriptif statistik dan Analisis Regresi Linear Berganda dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel inflasi, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.

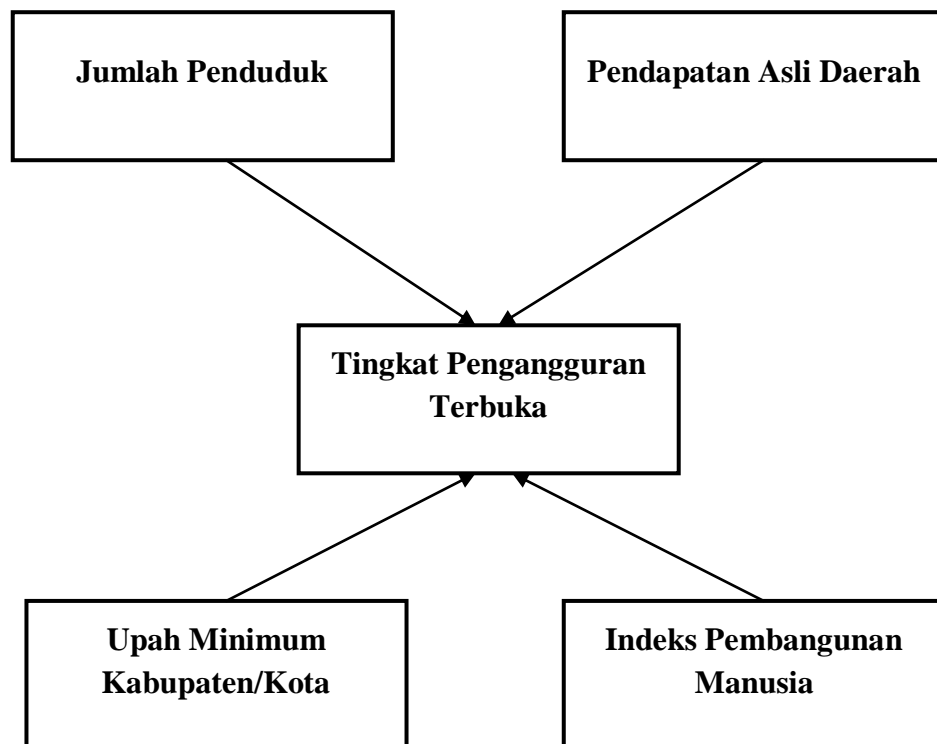
C. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah yang akan diuji oleh data. Karena hipotesis sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Karena merupakan kerja dari teori yang menjadi jawaban terhadap persoalan penelitian sebelumnya mengumpulkan data Maka dari itu suatu penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan. Dari uraian latar belakang, rumusan masalah dan penelitian terdahulu dan juga teori yang telah dijelaskan dapat dilihat pengaruh hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan dalam beberapa hipotesis sebagai berikut:

- a.** Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b.** Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
- c.** Diduga Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
- d.** Diduga indek Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kerangka Berfikir

Untuk memperjelas dan mempermudah pemikiran dalam penelitian yang dilakukan mengenai penjelasan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka disusun kerangka penelitian ini yang akan dilakukan seperti berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian